

Polarisasi Politik Pasca Pemilihan Kepala di Desa Ulak Mengkudu Sumatera Selatan

Lismita Lismita¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi dalam masyarakat tingkat lokal khususnya Desa Ulak Mengkudu karena adanya polarisasi politik. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena polarisasi politik terjadi di tingkat lokal akibat adanya perbedaan visi dan misi yang menimbulkan kepentingan khusus antar pendukung. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori konflik oleh Ralf Dahrendorf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan 21 orang. Adapun kriteria masyarakat Desa Ulak mengkudu yang terlibat pengelompokan kandidat, tokoh masyarakat, agama, dan masyarakat netral. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kepada masyarakat. Wawancara mendalam kepada masyarakat untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi. Studi dokumentasi diambil dari dokumen arsip desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi politik pasca pemilihan kepala desa menyebabkan yang *pertama*, Adanya faktor penyebab polarisasi politik yaitu karena unsur figur politik dan faktor kekeluargaan yang berbeda. *Kedua*, Dinamika yang terjadi dalam masyarakat terjadi pergeseran interaksi. *Ketiga*, Tingginya partisipasi politik akibat adanya polarisasi.

Kata Kunci: Polarisasi Politik; Partisipasi Politik; Politik Lokal; Pemilihan Kepala Desa.

Abstract

This research aims to explain the dynamics occurring within the local community, particularly in Ulak Mengkudu Village, due to polarization. This study is interesting to examine because polarization occurs at the local level as a result of differences in vision and mission that create specific interests among supporters. The theory used to analyze this research is Ralf Dahrendorf's conflict theory. This study employs a qualitative approach with a case study design. The informant selection technique for this research uses purposive sampling, with criteria including members of Ulak Mengkudu Village involved in candidate grouping, community leaders, religious figures, and neutral citizens, totaling 21 informants. Data collection was conducted through community observation, in-depth interviews to explore the dynamics occurring, and documentation studies taken from village archive documents. The research results indicate that, first, the factors causing political polarization are due to differing political figures and family ties. Second, the dynamics within the community show a shift in interactions. Third, there is a high level of political participation as a result of polarization.

Keywords: Local Politics; Political Polarization; Political Participation; Village Head Election.

How to Cite: Lismita, L. & Putra, E.V. (2024). Polarisasi Politik Pasca Pemilihan Kepala di Desa Ulak Mengkudu Sumatera Selatan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 406-416.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

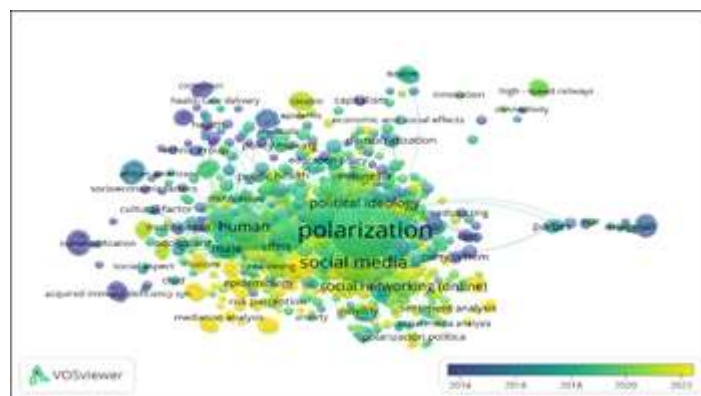
Pendahuluan

Setiap pemilihan umum diselenggarakan, sering kali muncul polarisasi politik dalam masyarakat (Nashrullah, 2023). Polaritas politik merujuk pada perpecahan dan perbedaan yang mencolok antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang timbul dari pilihan politik, keyakinan, dan pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu (Yana et al., 2022). Polarisasi politik biasanya disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan keyakinan saat memberikan dukungan politik. Menurut Ramadhan (2023) dalam penelusuran kompas.com (Juli 2023) pada Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan ditemukan bahwa 56% masyarakat khawatir akan terjadinya polarisasi, artinya polarisasi dalam hal ini sangat mungkin terjadi perpecahan dan pembelahan setiap akan dilaksanakan Pemilihan Umum. Polarisasi tidak hanya terjadi dalam pemilu nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tapi juga berpotensi terjadi pada pemilihan di tingkat lokal seperti pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa adalah bagian integral dari prinsip demokrasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa, dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan daerah (Kusnadi, 2015). Pemilihan kepala desa bisa dianggap sebagai perayaan demokrasi, di mana warga desa berkesempatan untuk turut serta dengan memberikan suara mereka untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk memajukan desa tersebut (Lating et al., 2017). Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang ada di level desa.

Kondisi polarisasi politik di Indonesia sangat jelas terlihat, menariknya sangat sedikit kajian akademik yang serius mendalaminya serta kajian-kajian politik Indonesia kontemporer sangat didominasi oleh analisis elektoral yang kerap dilakukan dengan perspektif normatif (Karim, 2019). Pada tahun 2022 Kabupaten Empat Lawang menggelar pemilihan kepala desa secara serentak, yang dilakukan di 103 desa dari 10 Kecamatan. Pemilihan kepala desa ini dilaksanakan pada 28 Juni 2022 (Jurnas.com). Salah satu desa tersebut adalah Desa Ulak Mengkudu yang memiliki 3 kandidat calon kepala desa. Polarisasi yang terjadi di Desa Ulak Mengkudu adalah akibat adanya perbedaan visi dan misi dari beberapa kandidat sehingga menimbulkan kepentingan khusus antar pendukung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Ulak Mengkudu, terdapat dua pihak yang terlibat dalam polarisasi. Polarisasi ini muncul setiap akan diadakan pemilihan umum, namun untuk polarisasi yang sangat nampak adalah ketika terjadi ketika pemilihan kepala desa di Desa Ulak Mengkudu. Hal ini terbukti dari observasi awal dari hasil wawancara diungkapkan bahwa masyarakat yang terlibat polarisasi menyebabkan berkurangnya interaksi sosial. Berdasarkan pencarian data SCOPUS menggunakan *keyword polarization, political polarization, politics, dan human* yang membahas tentang polarisasi sebanyak 1344 artikel pada gambar 1, namun belum ditemukan penelitian yang menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam masyarakat ketika terjadinya polarisasi politik yang dikaji dalam masyarakat lokal.



Gambar 1. Beberapa *keyword* yang merujuk pada *polarization, political polarization, politics, dan human* oleh para peneliti dunia (Sumber: VOSViewer Scopus tahun 2024)

Penelitian yang berkaitan dengan polarisasi politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yana et al., (2022) yang mengkaji bagaimana fenomena polarisasi dan disinformasi mempengaruhi perilaku politik masyarakat di media sosial dalam wacana pelemahan KPK. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mansyur (2023) juga membahas penyebab polarisasi semakin meningkat antara islamis dan pluralis di Indonesia. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rianadiwa et al., (2024) membahas polarisasi menyebabkan banyak dampak negatif seperti perpecahan, merusak demokrasi serta menghilangkan kredibilitas partai politik bahkan berdampak terhadap pemerintahan. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Annas et al., (2019) yang membahas media sosial

sebagai opini dalam polarisasi politik. *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, (2023) yang membahas bahwa faktor pendorong polarisasi politik salah satunya perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat.

Penelitian di atas berfokus membahas polarisasi politik yang diamati dalam lingkup yang luas, seperti media sosial. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana berfokus mengkaji polarisasi politik di tingkat lokal, khususnya pada pemilihan kepala desa yang memusatkan perhatian kepada dinamika yang terjadi dalam masyarakat serta dampak yang ditimbulkan akibat adanya polarisasi politik di desa. Penelitian ini penting untuk dikaji agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana polarisasi politik mempengaruhi masyarakat setelah pemilihan kepala desa. Ini membantu kita memahami dinamika sosial yang mungkin terjadi di tingkat lokal, serta dapat menjadi langkah awal menuju pemulihan dan perbaikan dalam masyarakat yang mengalami polarisasi pasca pemilihan kepala desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Ulak Mengkudu pada 30 Maret sampai 12 Mei 2024. Penelitian kualitatif mencoba untuk mendalami, mengerti dan menerobos ke dalam gejala-gejala sosial serta menyimpulkan gejala tersebut sesuai dengan fakta atau konteksnya (Harahap, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati untuk menemukan informasi yang menarik bagaimana polarisasi tersebut terjadi. Wawancara mendalam menanyakan polarisasi politik di tingkat lokal dilakukan dengan masyarakat. Dokumentasi diambil dari berbagai arsip pemerintahan. Teknik pengumpulan informan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 21 orang, seperti dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Waktu
1	Libraco	34 tahun	SMA	Kepala Desa	14 April 2024
2	Rusdi	47 tahun	SMA	Petani/Kesra	12 April 2024
3	Radit Hanafi	40 tahun	SMA	Petani/Kadus III	15 April 2024
4	Arpin Jateng	43 tahun	SMA	Petani	15 April 2024
5	Ison Erlendi	54 tahun	SMA	Petani/Kasih Pemerintahan	15 April 2024
6	Hardini	41 tahun	SMA	Petani/Kadus IV	15 April 2024
7	Erwin	44 tahun	SMA	Petani/Kasi Pembangunan Desa	15 April 2024
8	Rijok	37 tahun	SMA	Petani/Kadus II	15 April 2024
9	Yuhandes	40 tahun	SMA	Petani/Bendahara Desa	15 April 2024
10	Ardial Agus	44 tahun	SMA	Petani	15 April 2024
11	Haji Jumli	35 tahun	SMA	Petani/Kadus I	15 April 2024
12	Lincang	28 tahun	SD	Ketua karang taruna	15 April 2024
13	Fitriani	38 tahun	S1	Karyawan/ASN	17 April 2024
14	Upik Junita	22 tahun	SMA	Pelajar/Mahasiswa	21 April 2024
15	Risma Pertiwi	23 tahun	SMA	Pelajar/Mahasiswa	25 April 2024
16	Gilang Nauri Yosef	21 tahun	SMA	Pelajar/Mahasiswa	19 April 2024
17	Novitasari J	22 tahun	S1	Karyawan	7 Mei 2024
18	Weti Mayang Sari	32 tahun	SMA	Ibu rumah tangga	14 April 2024
19	Mira Herleni	44 Tahun	SMP	Ibu rumah tangga	5 April 2024
20	Hartuti Linsi	46 Tahun	SMP	Ibu rumah tangga	10 Mei 2024
21	Surni	64 Tahun	SMP	Petani/Tokoh Agama	8 Mei 2024

Sumber: Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat

Adapun kriteria informan diatas yaitu masyarakat Desa Ulak mengkudu yang terlibat pengelompokan kandidat, tokoh masyarakat, agama, dan masyarakat netral. Penelitian ini juga menggunakan teknis analisis data dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Model Miles & Huberman (2014) digunakan sebagai metode yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Polarisasi politik di tingkat lokal penting untuk memahami ketegangan sosial dan mengidentifikasi risiko konflik dalam komunitas atau kelompok tertentu. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 21 Narasumber di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kriteria yang telah ditentukan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa polarisasi membawa perubahan pada dinamika di masyarakat. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya:

Faktor Penyebab Polarisasi Politik

Dinamika dalam kehidupan masyarakat sering diartikan sebagai adanya ikatan antara kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya (Marhayati, 2016). Pada penelitian ini ditemukan bahwa polarisasi sangat jelas terjadi di dalam masyarakat Desa Ulak Mengkudu ketika pemilihan kepala desa hingga pasca pemilihan kepala desa, hal ini diungkapkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Ulak Mengkudu dan dibenarkan oleh Kepala Desa yang terpilih. Namun, pengelompokan masyarakat tersebut lebih kuat terjadi ketika penetapan kepala desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yaitu Bapak Arpin (43 tahun), ia mengatakan bahwa:

“...Sebelum pemilihan kepala desa memang sudah nampak masyarakat yang berkelompok tapi setelah pemilihan kepala desa lebih jelas lagi, terungkap semua dan jelas sekali masyarakat yang saling berpihak, mungkin karena masyarakat yang terlibat perkelompokan itu sudah terbentuk sejak lama, sehingga setelah Pilkada pun masih tetap berkelompok...”(Wawancara tanggal 17 April 2024).

Faktor yang menyebabkan masyarakat jadi berkelompok adalah karena perbedaan visi-misi yang disampaikan oleh beberapa calon kepala desa. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Rusdi (47 tahun), ia mengatakan bahwa:

“...Karena berbeda pendapat, beda pilihan dari masyarakat maupun dari yang berkelompok melihat dari segi visi-misi masing-masing. Tapi, sebagian masyarakat masih ada yang memilih berdasarkan sistem kekeluargaan, tapi sebagian menilai dari pola pikir, bagaimana cara bertindak dengan masyarakat. Banyak juga yang keluarganya mencalonkan diri tapi lebih memihak ke calon yang lain, tidak melihat latar belakang keluarganya...”(Wawancara tanggal 12 April 2024).

Selain karena perbedaan visi-misi polarisasi politik juga terjadi karena adanya cara berpolitik dalam masyarakat yang berbeda, yang diungkapkan oleh Yuhandes (40 tahun), ia mengatakan bahwa:

“...Ada dua penyebab pengelompokan, pertama karena pengaruh berbeda pilihan, kedua karena cara orang yang berpolitik berbeda, ada yang agak keras, ada yang pakai penekanan, dan ada yang biasa saja, masyarakat juga melihat bagaimana perlakuan dari calon kepala desa tersebut...”(Wawancara tanggal 15 April 2024).

Pendapat yang mengungkapkan karena berbeda visi-misi ini juga dibenarkan oleh beberapa informan yaitu Weti (34 tahun), Mira (44 tahun), Risma (23 Tahun), Hardini (46 tahun), Erwin (44 tahun), Ison (54 tahun) dan juga Lincang (28 tahun). Selain perbedaan visi-misi tersebut pengelompokan masyarakat ini ternyata terjadi karena adanya unsur politik yang lebih kuat seperti karena dijanjikan jabatan, dan hal ini diungkapkan oleh Arpin (43 tahun) yang dilakukan.

“...Iya jelas ada unsur kekeluargaannya, karena kalau calon kades adalah keluarga kita pasti kita dukung, ada janji politik, pasti ingin menang. Kadang ada juga yang menjadi korban janji politik itu. Kalau misalnya yang dijanjikan tidak tinggi-tinggi maka dampaknya tidak akan lama. Yang namanya politik di desa tergantung situasi politiknya. Kalau misalnya politiknya tidak banyak janji pasti hubungan antar masyarakat pasti baik-baik saja. Tapi karena banyak janji dan mungkin masyarakat merasa dikecewakan jadi agak sulit untuk bergabung kembali...”(Wawancara tanggal 17 April 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab polarisasi adalah karena adanya figur politik, dalam penelitian Syarwi (2024) disebutkan bahwa figur/sosok politik lebih sering menjadi pertimbangan dalam sebuah Pemilihan legislatif, sedangkan pandangan tentang “isu dan program” lebih sering di pertimbangkan pada Pemilihan Presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya figur politik yang menonjol dan hubungan kekeluargaan dapat mempengaruhi cara pemilih menafsirkan pengetahuan tentang pilihan dan membuat keputusan politik, yang pada akhirnya dapat memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

Penelitian Rahmawati (2017), juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh figur politik dalam pelaksanaan pilkada, penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap partisipasi politik, dan *credibility* mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap partisipasi politik. Perbedaan karakter masing-masing calon pemimpin memberikan warna yang unik bagi calon pemilih dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa di Desa Ulak Mengkudu. Dengan gaya kepemimpinannya yang unik, ia berhasil meraih simpati banyak pihak. Masyarakat menilai secara langsung kepribadian kandidat berdasarkan cara kandidat berbicara, sikap, tindakan, dan sikap.

Selain karena faktor diatas polarisasi yang terjadi di Desa Ulak Mengkudu juga disebabkan karena adanya unsur kekeluargaan. Berbeda pilihan karena unsur kekeluargaan dibenarkan oleh beberapa narasumber, salah satunya saudara Lincang (28 tahun) selaku ketua karang taruna yang mengatakan bahwa tidak semuanya masyarakat berada pada posisi netral dan tidak peduli mengenai siapa pemimpin desa kelak. Hal serupa juga peneliti tanyakan kepada salah satu masyarakat yang berstatus mahasiswa yaitu Risma (22 Tahun) yang dilakukan ia mengatakan bahwa:

“...Salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok adalah karena masyarakat Desa Ulak Mengkudu sendiri masih erat sistem kekeluargaan, jadi walaupun kita tidak kenal dengan masyarakat yang ada di Desa Tersebut, kita masih termasuk kedalam keluarga mereka. Ntah itu nenek moyang kakak beradik, ataupun sepupu yang jauh, karena calon kepala desa ini juga bagian keluarga mereka...”(Wawancara tanggal 25 April 2024).

Selain itu juga adanya unsur kekeluargaan ini dibenarkan oleh narasumber yang lain, yang mana narasumber adalah masyarakat yang merupakan keluarga dari dari ketiga calon kepala desa, hal ini diungkapkan oleh Novita (22 tahun), ia mengungkapkan bahwa:

“...Beda pilihan itu pasti untuk menentukan siapa pemimpin kita kedepannya, apalagi kita masih keluarga gak bisa berbeda dengan pilihan yang lain. Sama seperti yang lain pun gak bisa meninggalkan keluarga mereka. Karena masih keluarga jadi pilih keluarga apalagi keluarga dekat...”(Wawancara tanggal 7 Mei 2024).

Masih dengan pertanyaan yang sama dibenarkan juga oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Arpin (43 tahun). Selain karena faktor kekeluargaan di atas pengelompokan masyarakat juga terjadi pada masyarakat yang netral tidak memihak kepada siapa saja. Pengelompokan ini jika dipersentasekan sekitar 30% yang bersikap netral, selebihnya selektif dalam melihat dan memilih calon pemimpin.

Dari pernyataan tersebut artinya kondisi politik di desa tentu sangat mempengaruhi bagaimana cara masyarakat bertindak. Politik tingkat lokal tentu berbeda dengan politik tingkat nasional, dimana persaingan di desa lebih kuat, namun karena persaingan yang lebih kuat inilah menyebabkan masyarakat berpola dan berkelompok, sehingga menurunkan integrasi dalam masyarakat. Tetapi jika masyarakat terbuka pikiran untuk bisa menilai sebuah demokrasi yang berjalan, maka pengelompokan ini tidak akan berlangsung secara permanen. Sesuai dengan ungkapan dari Gilang (21 tahun), ia mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya di tingkat desa jika masyarakat dan pemerintahannya melek dengan kondisi politik maka pengelompokan seperti ini tidak akan terjadi secara lama, karena posisi kita di tingkat desa maka otomatis pikiran masyarakat belum terbuka, tapi kemungkinan di tingkat kota sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Ternyata masyarakat desa belum terlalu paham tentang dunia demokrasi...”(Wawancara tanggal 19 April 2024).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kekeluargaan yang menjadi faktor penyebab terjadinya polarisasi. Ketika masyarakat merasa memiliki keterikatan antar satu sama lain, maka menciptakan tujuan bersama. Hal ini dapat menguatkan persepsi perbedaan dan menekankan persamaan di dalam kelompok serta dengan kelompok lain. Efek sampingnya, ini dapat meningkatkan pembentukan kubu-kubu politik yang saling bertentangan, di mana kelompok-kelompok merasa terdesak untuk mempertahankan atau memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan mereka dengan cara yang lebih keras.

Sebagai akibatnya, unsur kekeluargaan yang kuat dapat memperdalam polarisasi politik dengan memperkuat garis-garis pembagian antara "kami" dan "mereka", dan mempersulit upaya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Hal inilah yang terjadi didalam masyarakat desa Ulak Mengkudu.

Dinamika Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa

Sistem sosial masyarakat desa umumnya adalah interaksi sosial, dimana masyarakat biasanya hidup berkumpul dan bersatu demi mencapai tujuan bersama selain itu sistem yang terjadi dalam masyarakat desa pun adalah bergotong royong. Pada pasca pemilihan kepala desa kehidupan masyarakat Desa Ulak Mengkudu sedikit berubah dari sebelumnya, misal terjadi pergeseran interaksi dan hal ini diakui oleh masyarakat yang diungkapkan oleh Bapak Arpin (43 tahun), ia mengungkapkan bahwa:

“...Pasti ada pergeseran interaksi semenjak awal hingga saat ini masih berdampak, tapi sekarang sudah mendingan dari sebelumnya. Tahun kemarin bahkan ketika yang mengadakan syukuran aja susah untuk menghadiri, jadi sangat nampak, tapi setahun terakhir ini sudah mendingan, masyarakat sudah mulai berbaur...”(Wawancara tanggal 15 April 2024).

Selain itu juga, pergeseran interaksi ini sangat jelas terjadi dalam masyarakat karena dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menghindari dalam acara-acara yang diadakan oleh pemerintahan, dan pergeseran tersebut mencapai 80% dari sebelum diadakannya pemilihan kepala desa, secara tidak langsung masyarakat ada yang saling membenci hal ini terungkap oleh Bapak Rusdi (47 tahun).

Pergeseran interaksi ini berlangsung selama satu tahun, di tahun kedua masyarakat mulai meredam dan berangsur menyatu kembali dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Dapat diartikan bahwa dalam waktu setahun terakhir ini masyarakat kembali berbaur dan menyatu, berbeda dengan satu tahun sebelumnya. Pernyataan ini juga diakui oleh beberapa informan seperti dari Upik Junita (22 tahun), Jumli (35 tahun), Yuhandes (40 tahun), Gilang (21 tahun) dan informan lainnya. Dalam waktu satu tahun masyarakat kembali mencoba menyatukan kehidupan, hal ini dilihat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, yang diikuti oleh masyarakat yang terlibat polarisasi tersebut.

Tak hanya itu, tanya jawab peneliti kepada beberapa informan lainnya bahwa faktor yang dapat menyebabkan masyarakat berangsur bersatu adalah karena beberapa program yang dijalankan oleh pemerintahan dengan tujuan agar menyatukan kembali masyarakat, misalnya dengan adanya program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Mereka mengembangkan Orgen Tunggal yang digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk acara pernikahan atau acara formal lainnya. Orgen Tunggal ini ditawarkan kepada masyarakat yang kurang mampu karena dapat digunakan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Dengan adanya Orgen Tunggal ini dapat menyadarkan masyarakat yang sulit untuk bergabung menjadi lebih terbuka pikirannya karena kebaikan yang diberikan oleh pihak pemerintahan, dan pernyataan ini diakui oleh masyarakat yang mengelola BUMDes tersebut yaitu Bapak Ardial (44 tahun), ia mengungkapkan bahwa:

“...BUMDes berusaha untuk memunculkan inovasi yang dapat menyatukan kembali masyarakat Ulak Mengkudu ini, salah satunya dengan adanya orgen tunggal, dan insya allah kedepan akan membeli mobil cerry untuk membawa barang acara pernikahan maupun kegiatan sosial lainnya, agar masyarakat merasakan manfaat dari pemerintahan sekarang dan pikiran masyarakat terbuka dan menyatu kembali...”(Wawancara pada 15 April 2024).

Pergeseran dari pemilihan kepala desa ke pemilihan umum ternyata membawa dampak positif bagi dinamika yang terjadi didalam masyarakat, hal ini dikarenakan pengelompokan yang sebelumnya terjadi telah berubah, hal ini diungkapkan oleh Ibu Weti (32 tahun), ia mengungkapkan bahwa:

“...Ada saja pergeseran interaksi antar sesama masyarakat, dari cara berinteraksi dll pasti ada. Misal yang awalnya kompak terus tidak kompak lagi. Tapi sekarang sudah berangsur meredam, sudah sekitar beberapa bulan terakhir, ini dikarenakan pemilihan umum tadi. Kemudian masyarakat bersatu kembali karena adanya kepentingan politik, sehingga mereka membentuk tim-tim untuk mensukseskan DPRD...”(Wawancara tanggal 14 April 2024).

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Arpin (43 tahun) ia mengungkapkan bahwa politik yang di Desa tidak sama dengan politik yang dijalankan di kota atau pemerintahan tingkat nasional, pengetahuan masyarakat tentang politik sangat minim, sehingga yang ada di dalam politik desa hanyalah tentang perebutan kekuasaan kepentingan pribadi. Sehingga memicu kuatnya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penulis memberikan pertanyaan bahwa apakah polarisasi juga akan terjadi ketika pilkada mendatang? kemudian Bapak Arpin (43 tahun), mengungkapkan bahwa:

“...Tidak terlalu karena sudah sampai ke tingkat provinsi, walaupun ada pilihan, tapi tidak seperti demokrasi yang terjadi di tingkat desa. Kalau dulu kondisinya memang sangat panas. Tapi selaku pelaku tim politik ketika dia menang, banyak yang ikut campur banyak tim-tim. Misal dari pendukung yang menang, mengusik pendukung yang kalah, begitupun sebaliknya.

Kalau kita paham dunia politik, pasti tidak akan terlalu ikut campur masalah itu....”(Wawancara tanggal 15 April 2024).

Adanya pergeseran ini, masyarakat juga ikut terlibat dalam pengelompokan kembali namun dalam situasi yang berbeda, karena polarisasi akan terus terjadi dalam masyarakat. Namun, uniknya masyarakat yang terlibat dalam polarisasi ini berada dalam kelompok yang berbeda. Artinya dengan adanya polarisasi pemilihan kepala daerah dapat menyatukan masyarakat yang terlibat polarisasi akibat pemilihan kepala desa. Hal ini dibenarkan oleh kepala desa terpilih Bapak Libraco (34 tahun) sebagai kepala desa yang telah menjabat selama kurang lebih 2 tahun ini ia lebih banyak mengetahui bagaimana keadaan dari masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang diungkapkan beberapa informan lainnya, pergeseran interaksi ini tidak akan berlangsung lama. Hal ini juga diungkapkan oleh informan Risma (22 tahun):

“...Pergeseran ini tidak terjadi secara permanen, walaupun nanti akan terjadi pergeseran hubungan antar masyarakat. Pergeseran terlihat ketika kampanye, pemilihan, dan pasca pemilihan hingga pelantikan kepala desa. Pergeseran ini seperti tidak menyapa, saling menjelek-jelekan juga, terkadang mereka merasakan sesuatu yang tertinggal di hati mereka, ketika keadaan mulai meredah maka mereka pasti akan merasa bahwa hubungan mereka kurang bagus...”(Wawancara tanggal 25 April 2024).

Pergeseran interaksi seperti ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan pengembangan masyarakat karena menghambat koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat desa untuk mengupayakan keharmonisan dan saling menghormati, menjaga komunikasi terbuka, dan membangun hubungan yang baik.

Namun pergeseran interaksi ini tidak berlangsung lama, masyarakat kembali berangsur karena adanya otoritas pemegang kekuasaan yakni pemerintahan desa yang dapat membantu masyarakat bersatu. Untuk mengatasi adanya konflik tersebut terdapat kontrol dari pemegang otoritas yang lebih tegas dan dominan dalam upaya mereka untuk menyeimbangkan atau mengatasi konflik dan ketegangan yang timbul. Kontrol otoritas sangat penting untuk meredakan polarisasi karena mereka memfasilitasi masyarakat untuk dapat bersatu kembali, menegakkan aturan yang adil, dan mengarahkan keputusan inklusif antar masyarakat tanpa dibedakan.

Tingginya Partisipasi Politik

Polarisasi politik di Desa Ulak Mengkudu ternyata membawa demokrasi pada tahap revitalisasi, semua ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang mengalami periode kebangkitan yang menjanjikan, di mana masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan seperti Bapak Rusdi (47 tahun), beliau mengungkapkan bahwa:

“...Polarisasi sebenarnya hal yang baik, politik di masyarakat dapat hidup dan masyarakat lebih selektif dalam memilih siapa pemimpinnya, sistem masyarakat yang bodoh amat sekitar 30%, selebihnya melek untuk memilih pemimpin...”(Wawancara tanggal 12 April 2024).

Masyarakat desa yang melek politik adalah fenomena yang tersentral dalam dinamika politik lokal (As'ad, 2020). Di era informasi yang semakin terhubung, masyarakat pedesaan tidak lagi terisolasi dari gejolak politik nasional dan internasional. Mereka lebih terlibat dalam proses politik, baik melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum atau terlibat dalam diskusi dan debat politik dalam komunitas mereka. Ketersediaan media sosial dan kemudahan akses terhadap informasi politik memungkinkan masyarakat pedesaan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang isu-isu politik dan mengakses informasi yang lebih akurat (Fauziah et al., 2023). Hal ini menciptakan paradigma baru dimana penduduk pedesaan tidak sekedar menjadi objek kebijakan politik tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam proses perumusan kebijakan.

Seperti yang peneliti temukan di lapangan melihat bahwa antusias masyarakat desa dalam menjalankan demokrasi adalah hal yang luar biasa. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Arpin (43 tahun) yang mengungkapkan bahwa:

“...Intinya polarisasi tidak baik, tapi polarisasi dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, karena dianggap masyarakat baru mengenal demokrasi yang sesungguhnya, karena selama ini masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam berpolitik harus ada yang menang, ada yang kalah. Bahkan pendukung ada yang dikecewakan, itu yang lebih bertolak belakang...”(Wawancara tanggal 15 April 2024).

Ketika penduduk desa terlibat aktif dalam politik, mereka tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang berdampak negatif terhadap kehidupan mereka sehari-hari, namun mereka juga menjadi agen perubahan yang membantu membangun proyek-proyek yang bijaksana dan berjangka panjang. Dari beberapa observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa masyarakat desa yang baik mampu melihat isu-isu lokal yang memerlukan perhatian, menyalurkan keprihatinan mereka dengan lebih efektif, dan memilih pemimpin yang memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat desa dalam politik membantu mengurangi kesenjangan antara desa dalam hal akses terhadap keputusan dan sumber daya. Oleh karena itu, mengembangkan kesadaran politik dan membina masyarakat merupakan langkah penting menuju peningkatan demokrasi lokal dan mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Salah satu bukti bahwa Pilkades dapat meningkatkan partisipasi politik dapat dilihat dari perbandingan pemilihan kepala desa dan pemilihan legislatif, dari hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa masyarakat jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masyarakat Desa Ulak Mengkudu ketika Pilkades adalah 941 mata pilih. Sedangkan pada pemilihan Legislatif diambil dari pemilihan Presiden jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masyarakat Desa Ulak Mengkudu adalah 1.114 mata pilih. Dalam perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa mencapai sekitar 90%, sementara dalam pemilihan presiden hanya sekitar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa minat dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa jauh lebih tinggi daripada dalam pemilihan presiden.

Partisipasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Keterlibatan warga dalam urusan negara merupakan faktor krusial (Saputra, 2021). Partisipasi dalam konteks ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh warga untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, polarisasi politik dalam konteks demokrasi seharusnya mendorong partisipasi warga negara, meningkatkan akuntabilitas pemimpin dan meningkatkan kualitas politik. Namun, penting untuk dipahami bahwa polarisasi yang ekstrim dan tidak terkendali juga dapat merusak stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara opini publik yang sehat dan koherensi sosial, yang diperlukan untuk menilai efektivitas sistem demokrasi (Nurmandi et al., 2021).

Dalam konteks yang tepat, polarisasi dapat bermanfaat bagi kehidupan demokrasi karena mendorong diskusi yang lebih aktif dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran politik menjadi salah satu pilar utama dari sistem sosial dan juga politik (Zahro et al., 2023). Ketika kekuatan-kekuatan yang berbeda bersatu, yang menyebabkan masyarakat bersatu untuk mendukung posisi politik. Dalam suasana yang ditandai dengan banyaknya perbedaan pendapat dan pendapat yang kuat, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong reformasi yang lebih bijaksana. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Kades Libraco (34 tahun) ia mengungkapkan bahwa:

“...Polarisasi positif pasti akan terjadi, dengan adanya polarisasi individu, masing-masing individu pasti berbaur seiring waktu. Dampaknya dengan adanya polarisasi semakin kenal demokrasi dan misal masyarakat yang tadi tidak saling mengenal jadi saling mengenal...”(Wawancara tanggal 14 April 2024).

Oleh karena itu, polarisasi politik dalam konteks demokrasi seharusnya mendorong partisipasi warga negara, meningkatkan akuntabilitas pemimpin dan meningkatkan kualitas politik. Namun, penting untuk dipahami bahwa polarisasi yang ekstrim dan tidak terkendali juga dapat merusak stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara opini publik yang sehat dan koherensi sosial, yang diperlukan untuk menilai efektivitas sistem demokrasi.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan narasumber ternyata dampak adanya polarisasi dapat meningkatkan pematangan demokrasi lokal. Meskipun polarisasi merupakan ancaman terhadap stabilitas demokrasi, polarisasi ini juga berpotensi memperkuat demokrasi lokal dengan mendorong partisipasi aktif, pemahaman yang lebih mendalam terhadap perbedaan pendapat, dan peningkatan kesadaran politik (Yusri, 2020). Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa polarisasi dapat menumbuhkan pematangan demokrasi lokal. Salah satu narasumber yang mengungkapkan hal tersebut yaitu Bapak Kepala Desa Libraco (33 Tahun) dan beberapa narasumber mengungkapkan hal serupa ia mengungkapkan bahwa:

“...Karena adanya polarisasi, jadi kenal demokrasi dan bagaimana demokrasi tersebut dapat bekerja di sistem sosial. Bisa juga ada yang tidak mengenal masyarakat jadi lebih kenal, banyak hal positifnya karena hak mutlak...”(Wawancara tanggal 14 April 2024).

Polarisasi dalam konteks politik sering kali memunculkan pematangan demokrasi lokal dengan cara yang kompleks. Ketika terjadi polarisasi yang kuat di tingkat nasional atau regional, masyarakat cenderung lebih aktif terlibat dalam debat publik, meningkatkan kesadaran politik, dan memperkuat identitas politik lokal. Fenomena ini terjadi ketika individu/masyarakat memahami pentingnya hak-haknya dalam sistem politik dan berperan aktif dalam menentukan arah masa depan negara melalui berbagai cara seperti pemilu, demonstrasi, gerakan politik, dan partisipasi warga untuk memenuhi peran jabatan. Tingkat partisipasi politik yang tinggi seringkali dikaitkan dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga-lembaga negara dan juga meningkatkan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Tingginya partisipasi politik terjadi di Desa Ulak Mengkudu menunjukkan kesadaran dan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat dalam membangun demokrasi ditingkat lokal serta mampu mengambil keputusan politik yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Partisipasi politik menjadi sarana utama bagi penduduk menyuarkan aspirasi mereka.

Pembahasan

Polarisasi di tingkat lokal dapat mempengaruhi dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama di Desa Ulak Mengkudu, adanya polarisasi ini juga mengakibatkan tingginya partisipasi politik di masyarakat tingkat desa serta pematangan demokrasi lokal. Polarisasi politik merupakan suatu kondisi yang dapat dipahami sebagai perbedaan dalam memahami, menilai, dan menyikapi suatu gejala atau peristiwa yang terjadi (Syafrizal, 2021). Apa pun tanggapannya, jika terjadi perbedaan pandangan (ada dua atau lebih tanggapan yang berbeda), secara sadar atau tidak sadar telah terjadi suatu kondisi yang terpola yang kemudian diperkuat dengan istilah polarisasi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengkaji dinamika sosial masyarakat di Desa Ulak Mengkudu dianalisis menggunakan teori konflik dari perspektif Ralf Dahrendorf. Dalam kajiannya Ralf Dahrendorf mengungkapkan bahwa konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem, begitu sebaliknya jika individu atau kelompok tidak terhubung dalam sistem maka tidak ada konflik. Menurut Ralf Dahrendorf relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan (Jhonson, 1986).

Dinamika dan konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Ulak Mengkudu merupakan kepentingan dari masing-masing pihak yang terjadi polarisasi. Masyarakat yang terlibat polarisasi mengakibatkan adanya konflik. Konflik ini mempengaruhi dinamika di masyarakat pasca pemilihan kepala desa. Penurunan interaksi serta hubungan antara masyarakat dengan kepala desa ikut menjadi dampaknya. Peran kepala desa dan pemerintahan mempengaruhi dinamika didalam masyarakat, dimana masyarakat merupakan pihak yang tidak memegang otoritas. Sementara pihak pemerintahan merupakan pihak pemegang otoritas. Ralf Dahrendorf mengungkapkan bahwa otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan dalam diri orangnya (Ritzer, 2014). Menurut Ralf Dahrendorf untuk melihat sebuah teori konflik memusatkan pada peran otoritas itu. Oleh karena itu dalam penelitian ini sebuah konflik di masyarakat Desa Ulak Mengkudu akan berangsur menghilang dan membaik karena adanya faktor dari luar dan faktor tersebut adalah faktor otoritas yakni pihak pemerintahan Desa Ulak Mengkudu.

Ralf Dahrendorf juga membedakan tiga golongan yang terlibat dalam konflik yaitu pertama kelompok semu, kepentingan dan konflik. Kelompok kepentingan terbentuk karena adanya janji politik yang ditawarkan oleh salah satu kandidat kepala desa. Sehingga bertentangan dengan kelompok semu yang memiliki visi-misi yang sama. Ralf Dahrendorf menyatakan setelah kelompok konflik muncul, kelompok konflik tersebut yang akan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial (Jhonson, 1986). Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Namun, pada polarisasi ini konflik yang terjadi tidak terlalu hebat, karena proses penyatuan kembali masyarakat, namun setelah pemilihan kepala desa menuju pemilihan kepala daerah polarisasi yang terbentuk akan berubah.

Polarisasi politik pasca pemilihan kepala desa adalah fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai daerah. Ini merujuk pada perpecahan tajam dalam pandangan politik dan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda setelah pemilihan kepala desa (Haboddin, 2012). Polarisasi ini bisa mempengaruhi dinamika politik dan sosial dalam masyarakat, serta berimplikasi pada tingkat partisipasi politik warga (Emilia & Ichwanuddin, 2015). Beberapa orang beranggapan bahwa polarisasi politik selalu memiliki dampak negatif, tetapi jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, polarisasi politik sebenarnya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan mendorong mereka untuk lebih aktif mengikuti berita terkini mengenai calon pemimpin (Rianadiwa et al., 2024). Secara sederhana, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala desa di Indonesia merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh (Simamora, 2011). Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilakukan secara langsung mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Meskipun demikian, proses demokrasi di tingkat lokal seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan esensi sejati dari demokrasi. Perkembangan yang menimbulkan berbagai masalah dan kompleksitas aturan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun demokrasi yang lebih baik.

Demokrasi akan dapat berjalan ketika meningkatnya aktivitas partisipasi politik warga negara (Rianadiwa et al., 2024). Penanaman demokrasi lokal sangat penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan melibatkan warga dalam kebijakan lokal, demokrasi lokal memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik komunitas, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan (Nurakhmadi et al., 2024). Partisipasi aktif ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil kebijakan, tetapi juga mendorong inovasi dan solusi kreatif untuk tantangan lokal. Selain itu, demokrasi lokal dapat mengurangi ketegangan sosial dengan menciptakan ruang untuk dialog dan kerjasama antar kelompok, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan terintegrasi. Di tingkat daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan, yang melibatkan berbagai tingkat kekuasaan dalam sistem politik suatu negara (Hidayah et al., 2024). Dengan kata lain, terdapat sistem politik nasional yang mencakup subsistem politik daerah, semuanya beroperasi dalam kerangka sistem negara yang berlaku.

Dinamika masyarakat pasca polarisasi yang terjadi di Desa Ulak Mengkudu sangat unik. Untuk menyatukan masyarakat melalui pemberian bantuan merupakan strategi yang bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Dengan memberikan dukungan yang diperlukan, pemerintah dan organisasi dapat membangun kepercayaan dan memfasilitasi integrasi komunitas secara lebih efektif. Pencegahan polarisasi politik nasional dan lokal memiliki perbedaan signifikan dalam skala dan pendekatannya. Polarisasi politik nasional biasanya melibatkan isu-isu besar yang mempengaruhi seluruh negara, seperti ideologi politik dan kebijakan nasional, dan memerlukan strategi yang luas seperti reformasi kebijakan, kampanye media massa, dan pendidikan publik untuk mengatasi ketegangan secara keseluruhan (Yusri, 2020). Sebaliknya, pencegahan polarisasi politik lokal lebih fokus pada masalah-masalah yang spesifik bagi komunitas atau daerah tertentu, seperti persaingan antar kandidat lokal atau kebijakan daerah, dan biasanya melibatkan dialog langsung antar kelompok lokal, program komunitas, dan penyelesaian masalah yang bersifat lebih terperinci dan kontekstual. Pendekatan lokal memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika daerah dan seringkali melibatkan upaya di tingkat komunitas untuk membangun kohesi sosial dan kerja sama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai polarisasi politik pasca pemilihan Kepala Desa Ulak Mengkudu dapat disimpulkan yang *Pertama*, Faktor yang menyebabkan masyarakat terjadi polarisasi adalah karena perbedaan figur calon kepala desa, faktor kekeluargaan yang masih sangat besar kemungkinan membentuk polarisasi. *Kedua*, dinamika yang terjadi dalam masyarakat membuat interaksi di masyarakat menurun dan berlangsung selama satu tahun, namun di tahun setelahnya berangsur normal kembali. *Ketiga*, adanya polarisasi politik dalam konteks demokrasi seharusnya mendorong partisipasi warga negara, proses pematangan demokrasi lokal, serta kontrol pemegang otoritas. Dengan polarisasi tidak hanya berujung pada konflik atau isolasi, namun juga dapat memicu memperkuat kolaborasi kerja sama yang lebih besar di antara berbagai pihak yang berselisih. Dalam masyarakat lokal partisipasi politik sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas pemimpin. Penelitian ini masih terbatas membahas polarisasi politik di tingkat lokal, adapun penelitian yang menarik adalah berkaitan dengan peran media sosial dalam memperkuat atau meredakan polarisasi masyarakat setelah pemilihan kepala desa. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana platform media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, atau memperkuat klaim-klaim yang memicu polarisasi.

Daftar Pustaka

- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- As'ad, M. U. (2020). Dinamika Politik Lokal. Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I.
- Emilia, R. R., & Ichwanuddin, W. (2015). Political Participation and Voting Behavior in General Election 2014. *Jurnal Penelitian Ilmu Politik*, 12(1), 117–135.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>

-
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Wai Ashri Publishing.
- Hidayah, N., Az-Jahra, S., Amanda, A., & Yunitasari, K. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 04-08.
- Jhonson, & Doyle, P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 564-580. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Lating, A., Suaib, R., & Suhu, B. La. (2017). Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan). *Kawasa*, 7(1), 31-40.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1-22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>
- Marhayati, N. (2016). Dinamika Kelompok Minoritas dalam Mempertahankan Tradisi Studi pada Keluarga Kerukunan Tabot di Bengkulu. *Temilnas IPS HIMPSI*, 14.
- Miles, M. & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum*, 1(2), 20-38.
- Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 48-62. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.173>
- Rahmawati, R. (2017). Pengaruh Figur Calon Pemimpin Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sunter Agung, Pada Pemilukada DKI JAKARTA 2012. *Journal of Governance*, 1(1).
- Ramadhan, A. (2023). Survei Litbang “Kompas”: Publik Khawatir Polarisasi Terulang pada Pemilu 2024. <https://nasional.kompas.com>.
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Triadi Salam, V., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 169-179.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 221. <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Syafrizal. (2021). Polarization of Global Leadership: An Analysis of the Three Factions of Leadership Power in Modern Leadership Theory. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5399-5411. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2330>
- Syarwi, P. (2024). Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 591-602.
- Yana, T. T., Rostiati, E. A., Ardhana, I., & Zidan, A. (2022). Political Polarization dan Political Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK dalam Memengaruhi Political Behavior. *Jurnal PolGov*, 4(2), 371-430.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809-820.
- Zahro, S. et al. (2023). Kesadaran Berpolitik di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.
-